

AWDI

Terkait Surat Pengosongan Rumah Dinas, Ini Tanggapan Pemerintah Kabupaten Samosir

Karmel - SAMOSIR.AWDI.OR.ID

Aug 11, 2023 - 20:40



Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Immanuel TP. Sitanggang

SAMOSIR-Terkait beredarnya Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara nomor 000. 2.3.2 /8474/2023 tertanggal 14 Juli tentang pengosongan aset pemprovsu yang dijadikan Rumah Dinas Bupati, Pemerintah Kabupaten Samosir langsung tanggapi dengan mengirimkan surat permohonan audiensi



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan P. Diponegoro Nomor 30 Telepon (061) 4156000
Medan kode Pos 20153

Medan, 4 Juli 2023

Nomor : 000.2.3.2 / 8414 / 1023
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Pengosongan Aset Pemprov
yang dijadikan Rumah Dinas Bupati
oleh Pemerintah Kabupaten Samosir

Yth. Bapak Bupati Samosir
di
Pangururan

Sehubungan dengan Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor. 000.2.3.2/7639/2023 tanggal 27 Juni 2023 hal Pengembalian Aset Pemprov yang dijadikan Rumah Dinas Bupati Samosir oleh Pemerintah Kabupaten Samosir, (terlampir).

Berkenaan dengan hal tersebut, diminta kepada Pemerintah Kabupaten Samosir untuk segera mengosongkan Aset Pemprov tersebut dalam jangka waktu paling lama tanggal 30 Juli 2023.

Demikian disampaikan atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
SEKRETARIS DAERAH,

ARIEF S. TRINUGROHO

Tembusan Yth :

1. Bapak Gubernur Sumatera Utara;
2. Bapak Wakil Gubernur Sumatera Utara;
3. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara;
4. Inspektur Provinsi Sumatera Utara;
5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Provinsi Sumatera Utara;
6. Kepala Satuan Polisi Pramong Praja Provinsi Sumatera Utara;
7. Arsp.

1441 / 10 / 2023

21 Juli 2023

“Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara tersebut telah ditanggapi oleh Bupati Samosir dengan mengirimkan surat permohonan audiensi kepada Gubernur Sumatera Utara,” ujar Bupati Samosir melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Immanuel TP. Sitanggung, Jumat (11/8/2023),

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Immanuel TP. Sitanggung dalam keterangan resminya juga menyampaikan, permohonan audiensi tersebut direncanakan akan melibatkan Pemerintah Daerah, DPRD Samosir, Tokoh Masyarakat serta perwakilan marga Naibaho.

“Namun hingga saat ini surat permohonan audiensi tersebut belum dijadwalkan oleh Pemerintah (Pemprov) Provinsi Sumatera Utara dan kita masih menunggu jawaban,” sebut Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Samosir Immanuel TP. Sitanggung

Lebih lanjut, ia juga berharap agar audiensi dengan Pak Gubernur Sumatera Utara bisa secepatnya terealisasi sehingga kita bisa mendapat solusi yang terbaik”, harap Immanuel Sitanggung dalam dalam keterangan tertulisnya

Immanuel TP. Sitanggung juga menerangkan, saat kunjungan kerja Komisi C DPRD Provinsi Sumut beberapa bulan yang lalu, Bupati Samosir Vandiko Gultom kepada Komisi C yang hadir menyampaikan bahwa Pesanggrahan Rumah Dinas Bupati Samosir merupakan aset Pemprov Sumut,

Rumah Dinas Bupati Samosir yang merupakan aset Pemprov Sumut hingga saat ini kondisi terawat dengan baik dan juga administrasi surat menyurat terkait adanya renovasi dan pinjam pakai selama ini selalu disampaikan kepada Pemprov.

“Bupati Samosir kala itu memohon karena rumah dinas ini sudah merupakan simbol bagi Kabupaten Samosir dan sudah diusulkan sebagai salah satu cagar budaya, maka hendaknya dihibahkan kepada Pemkab Samosir, minimal dilakukan tukar guling. Sehingga kedepan, aset ini bisa mendapat perlakuan lebih dari APBD Samosir untuk pemeliharaan dan perawatan”, terang Kadis Kominfo.

Pada saat itu, Wakil Ketua Komisi C DPRD Sumut Jubel Tambunan, SE terkait aset pesanggrahan Rumah Dinas Bupati Samosir menyampaikan sepanjang aturan dan regulasi mengizinkan, dirinya akan memperjuangkan agar aset ini bisa menjadi milik Pemkab Samosir. Tentu, harus didukung Pemkab Samosir untuk mendorong upaya tersebut, sehingga hal ini bisa cepat terealisasi.

Immanuel juga menyampaikan, saat itu Tokoh Masyarakat yang hadir diantaranya Ketua Umum PPRNB Kabupaten Samosir Mangiring Naibaho, Ketua Yayasan Sitolu Hae Horbo Naris Sitanggung, dan Ketua FKTM Kabupaten Samosir Obin Naibaho. Mereka mendukung upaya agar pesanggrahan tersebut dapat dihibahkan dan menjadi aset Pemkab Samosir.

Menurut Immanuel, salah satu opsi tukar guling tersebut, bisa saja dengan melakukan tukar guling antara Pesanggrahan Rumah Dinas Bupati Samosir yang merupakan aset Pemprovsu dengan Lahan Perkantoran Samsat UPTD. Pangururan yang merupakan aset Pemkab Samosir.(Karmel)